



RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN MUSI RAWAS**

TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Musi Rawas memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan komunikasi, informasi dan statistik kepada publik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2), terhitung sejak Peraturan Daerah tersebut ditetapkan maka Komunikasi dan Informatika bergabung dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas dengan sebutan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas. Tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas dipisah menjadi dua perangkat daerah salah satunya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

Pada Tahun Anggaran 2017 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 - 2021, yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan salah satu dasar dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, bahwa Kepala Perangkat Daerah berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja Perangkat Daerah serta keterkaitan visi, misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan *bottom up* serta perencanaan *top down*.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikemukakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Muara Beliti, Oktober 2018

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN MUSI RAWAS,



MUHAMMAD ROZAK, SE

Pembina

NIP. 19720606 200501 1 008

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i.
DAFTAR ISI	iii.
BAB I. PENDAHULUAN	1.
1.1 Latar Belakang	1.
1.2 Landasan Hukum	2.
1.3 Maksud dan Tujuan	4.
1.4 Sistematika Penyusunan	4.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	6.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD...	6.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	9.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	11.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	12.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	13.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	14.
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	14.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	15.
3.3 Program dan Kegiatan	16.
BAB IV PENUTUP	21.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Tabel 2 Plapon Penjabaran Anggaran Sementara TA. 2018

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas. Dimana salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas yaitu ” melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang teknis komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Sektor komunikasi informatika dan statistik yang berperan sebagai alat komunikasi dan penyebaran informasi bagi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan pertahanan keamanan yang mutlak perlu dikembangkan untuk melancarkan pergerakan manusia, barang dan jasa, sehingga akan memperlancar kegiatan perekonomian dan pengembangan sumber daya alam yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan sektor komunikasi dan informatika harus berlandaskan pada pemanfaatan potensi secara optimal, agar tercapai efektifitas dan efisiensi pelayanan.

Pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika di Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu alternatif solusi dalam mengantisipasi permasalahan komunikasi dan informatika yang muncul disebabkan adanya ketidak seimbangan antara peningkatan dan penyebaran jumlah penduduk pada wilayah perkotaan. Kondisi sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang ada di Kabupaten Musi Rawas serta sumber daya yang menanganinya masih belum dapat dikategorikan ideal.

Rencana Kerja yang disingkat **Renja** mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra PD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ke dalam program dan kegiatan dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis

jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan PD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Musi Rawas.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilanjutkan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja PD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-uangang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
 12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);

14. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No. 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, sosialisasi / penyuluhan dan penyampaian informasi, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Komunika, Informatika dan Statistik selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Renstra sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas adalah penjabaran perencanaan tahunan. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 juga harus dilakukan evaluasi. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Musi Rawas dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tahun 2016 Tanggal 28 Nopember 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2019 yang menjadi bahan kajian evaluasi atas pelaksanaan Renja tahun lalu adalah Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas tahun 2017. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Musi Rawas juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2019.
2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2019 adalah sebagaimana terlampir.

Berdasarkan pengukuran dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun Anggaran 2017 secara umum berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam pengertian realisasi fisik secara keseluruhan mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan mencapai 95,21%, hal ini dapat diuraikan pada Tabel dibawah ini :

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
Per Desember 2017

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Ket
1.	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran					
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	100	100	
	- Peny. Js. Komunikasi, SDA dan Listrik	67.000.000	50.445.673	75,29	100	
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	96.336.000	96.300.000	99,96	100	
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26.940.000	26.939.500	100	100	
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.000.000	30.000.000	100	100	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.695.000	16.660.000	99,79	100	
	- Peny. Komponen Instalasi Listrik	45.000.000	45.000.000	100	100	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.000.000	16.000.000	100	100	
	- Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan PerUUan	29.000.000	29.000.000	100	100	
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	236.000.000	235.910.404	99,96	100	
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	35.000.000	34.925.000	99,79	100	
	- Peny. Js. Pendukung Adm Teknis /Perkantoran	65.220.000	65.220.000	100	100	
	- Peny. Js. Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi	120.000.000	114.980.000	95,82	100	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :					
	- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	9.000.000	9.000.000	100	100	
	- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	41.000.000	40.716.455	99,31	100	
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	41.000.000	40.999.100	100	100	

	Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000	9.879.000	98,79	100	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia - Bimtek/Implementasi Peraturan PerUUan	22.500.000	20.000.000	88,89	100	
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja PD	31.450.000	31.450.000	100	100	
5.	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa - Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi - Radio Agropolitan - Pengembangan dan Pembinaan KIM - Pembangunan Gedung Media Center - Pengawasan dan Pengendalian Pos dan Menara Telekomunikasi	538.700.000 187.450.000 113.610.000 492.225.000 25.000.000	537.850.000 179.883.000 111.750.000 492.225.000 23.125.000	99,84 95,96 98,37 100 92,50	100 100 100 100	
6.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah : - Penyusunan Profil Daerah - Penyusunan Statistik Sektoral Daerah	133.000.000 25.000.000	130.880.000 24.909.500	98,41 99,64	100 100	
7.	Program Layanan e-Government : - Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Menunjang Pelaksanaan e-Government - Pemeliharaan dan operasional sistem pengadaan barang/jasa melalui LPSE - Pengembangan,	75.000.000 212.740.000 48.600.000	72.685.000 212.590.000 47.800.000	96,91 99,93 98,35	100 100 100	

	pemeliharaan dan pelayanan Website Kab. Musi Rawas					
	- Sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara elektronik	184.125.000	182.676.734	99,21	100	
	- Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor imigrasi	2.800.000.000	2.562.402.980	91,51	100	
8.	Program Pengelolaan Komunikasi Publik :					
	- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	50.650.000	49.360.000	97,43	100	
	- Pengadaan dan Instalasi Liquid Crystal Display (LCD)	200.000.000	194.320.000	97,15	100	
9.	Program Keamanan Informasi dan Persandian					
	- Pemeliharaan rutin/berkala jaringan sandi dan telekomunikasi	-	-	-	-	
	- Operasional PPID	-	-	-	-	
	Jumlah	6.025.451.000	5.737.092.546	95,21	100	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian, sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang teknis komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, berupa :

- a. pelaksanaan kegiatan sekretariat yaitu perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;

- b. penyusunan rumusan program dan penjabaran kebijakan teknis pelaksanaan operasional di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. perencanaan, penyiapan, pengelolaan, dan penelaahan kebijakan teknis program di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. pelaksanaan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan sarana dan prasarana di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- f. pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- g. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelaksanaan SPM terkait dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.

Adapun capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

No	Indikator	SPM	Realisasi Capaian		Proyeksi		Ket
			2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional						
	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional						

	melalui :						
	- Majalah	12 Kl/Thn	0	-	-	-	
	- Radio	12 Kl/Thn	12	12	12	12	
	- Televisi	12 Kl/Thn	-	-	-	-	
	Media baru seperti website (media online)	Setiap Hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	
	Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	12 Kl/Thn	-	-	-	-	
	Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	12 Kl/Thn	-	-	-	-	
	Media luar ruangan seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho						
	- Buletin	12 Kl/Thn	-	-	-	-	
	- Leaflet	12 Kl/Thn	-	-	-	-	
	- Booklet	12 Kl/Thn	-	-	-	-	
	- Brosur	12 Kl/Thn	-	-	-	-	
	- Spanduk	12 Kl/Thn	12	12	12	12	
	- Baliho	12 Kl/Thn	12	12	12	12	
II	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)						
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	75	80	80	85	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa hal yang masih menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan sumber daya aparatur dengan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan sebagai pendorong pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral;

- b. Pengadaan dan pengembangan infrastruktur di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi memerlukan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama, sehingga pembangunan infrastruktur ini menjadi skala prioritas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (*Media Center*) dan pengembangan Pusat Jaringan Informasi Pedesaan (PJIP), akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral (Perdagangan, Pariwisata, Perkebunan, Pertanian dan Investasi);
- c. Pengumpulan dan pengolahan data Kabupaten Musi Rawas. Data pembangunan sangat diperlukan dalam menentukan kebijakan untuk menentukan apa yang dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan pengolahan data yang akurat diharapkan kebijakan yang akan diambil dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan dapat berkesinambungan.
- d. Dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas telah disesuaikan dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Penyusunan Rencana Kerja (Renja PD) berpedoman pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019. Perencanaan Kinerja (Renja PD) juga merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rencana Kinerja (RKPD) memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas. Di samping itu, dokumen

rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi tersebut diterjemahkan dalam 7 misi pembangunan, dimana misi pertama (mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan), misi kedua (mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum).

Untuk menunjukan prioritas dalam mewujudkan visi misi menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, dimana agenda 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, 2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, 5. Meningkatkan kualitas hidup Indonesia, 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter bangsa dan 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas sebagai dinas teknis dalam pengembangan komunikasi dan informatika berupaya mendukung dan prioritas pembangunan nasional tersebut terutama pada agenda prioritas nomor 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dalam bidang komunikasi dan informatika, dengan membangun infrastruktur bidang komunikasi dan informatika yang diutamakan pada daerah-daerah dan desa.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta mengakomodasi isu-isu tren yang berkembang ke arah perubahan dari analisis strategik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan upaya untuk mewujudkan Visi melalui Misi Kepala Daerah dan arah kebijakan pembangunan sektor komunikasi dan informatika. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas membantu pencapaian misi 5 Bupati yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima. Untuk membantu pencapaian misi tersebut, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas menetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu : “ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi “.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Sedangkan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Dinas dalam jangka waktu tertentu, sehingga Dinas menetapkan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik bidang teknologi informasi dan

komunikasi.

2. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi pemerintahan.

Kebijakan adalah sesuatu ketentuan yang ditetapkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan agar semakin menjadi lancar dan terpadu dalam penerapannya secara operasional.

Sehubungan dengan pengertian diatas, kebijakan pembangunan yang menjadi prioritas Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Kabupaten Musi Rawas adalah:

1. Meningkatkan jumlah aparatur handal dengan menyelenggarakan inhouse training dan mengikutsertakan pada diklat/bimtek Bidang Kominfo, dan teknis teknis lainnya
2. Meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika
3. Membangun dan mengoptimalkan operasional sarana dan prasarana Kominfo
4. Mendorong peran swasta dalam membangun sarana dan prasarana kominfo
5. Melakukan Survey kebutuhan fasilitas kominfo secara berkala.
6. Mengadakan, membangun dan merehabilitasi fasilitas kominfo
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan teknologi komunikasi
8. Penyelenggaraan siaran radio Darussalam untuk menyebarluaskan informasi pembangunan daerah dan penyerapan aspirasi masyarakat.
9. Melakukan update informasi secara rutin pada Website Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
10. Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Informatika Komunikasi, Pengembangan Inisiatif TIK yang diusulkan sampai dengan tahun 2019 sesuai Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK), termasuk pengembangan Taman IT dan Desa IT
11. Mendorong peran swasta untuk mengoptimalkan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi
12. Melakukan pengawasan terhadap menara telekomunikasi
13. Sosialisasi / pelatihan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang ada dan menjadi bagian dari

suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

- a. Memperhatikan Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang;
- b. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;
- d. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi, baik Dinas Komunika, Informatika dan Statistik maupun Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Program dimaksud oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas telah disusun sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
6. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah;
7. Program Fasilitasi dan Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
8. Program Layanan e-Government;
9. Program Pengelolaan Komunikasi Publik;
10. Program Keamanan Informasi dan Persandian;

Sedangkan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- k. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran
- l. Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi

Capaian Program:

Terciptanya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Baik

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:

- a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Capaian Program:

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

- 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Capaian Program :

Terpenuhinya sumber daya aparatur yang handal.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Kegiatan :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

Capaian Program :

Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan organisasi perangkat daerah.

5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
- Optimalisasi Radio Darussalam
- Pembangunan Gedung Media Center (Tahap IV)
- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Capaian program :

Tersedianya jaringan informasi dalam meningkatkan pelayanan publik

6. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
- Penyediaan Video HUT Kab. Musi Rawas

Capaian Program :

Terlaksananya kerjasama informasi dan media massa

7. Program Layanan e-Government

Kegiatan :

- Optimalisasi dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
- Pengelolaan Pelayanan Portal Website Kabupaten Musi Rawas
- Pembangunan Aplikasi e-Government
- Pembuatan Master Plan Pelaksanaan e-Government (MURA Smart City)
- Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik e-Government

Capaian Program

Meningkatnya layanan e-Government

8. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

Kegiatan :

- Penyusunan Profil Daerah
- Penyusunan Statistik Sektoral Daerah

Capaian Program :

Tersedianya Buku profil daerah dan statistik sektoral daerah

9. Program Pengelolaan Komunikasi Publik

Kegiatan :

- Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Kab. Musi Rawas

Capaian Program :

Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan daerah

10. Program Keamanan Informasi dan Persandian

Kegiatan :

- Operasional Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)

Capaian Program :

Terlaksananya pengamanan informasi

IV PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 ini sebagai acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas.

Oleh sebab itu betapapun sederhananya rencana kerja ini, namun diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program-program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, lancar, tertib, dan teratur.

Muara Beliti, 15 Oktober 2018



PL. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN MUSI RAWAS,

MUHAMMAD ROZAK, SE

Pembina

NIP. 19720606 200501 1 008



Table 6.20.
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD DENGAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019

Organisasi / OPD : 2.10.01.-Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Halaman 1 dari 15

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Prioritas	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Tahun 2020	Jenis Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program / Outcome		Kegiatan / Output					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.2.10.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembanguna n Manusia Melalui Ketenagakerja an Pengembang an Layanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah		Menigkatnya Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik	50 %			1.730.760.000,00	1.730.760.000,00		-
2.10.2.10.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembanguna n Manusia Melalui Ketenagakerja an Pengembang an Layanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Diskomin fo	Menigkatnya Kinerja Aparatur dan Pelayan an Publik	50 %	Jumlah Rekening listrik, Rek Air dan Rek Telepon terbayar	3 rek listrik, 2 Rek Air dan 2 Rek Telepo n	144.000.000,00	144.000.000,00		2.10.01.-Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembanguna n Manusia Melalui Ketenagakerja an Pengembang an Layanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Diskomin fo	Menigkatnya Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik	50 %	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Yang Dibayar	4 Unit Kend dinas Rd.4 dan 10 Unit Kend. dinas Roda 2	20.000.000,00	20.000.000,00		2.10.01.-Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembanguna n Manusia Melalui Ketenagakerja an Pengembang an Layanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Diskomin fo	Menigkatnya Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik	50 %	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	7 Org	77.640.000,00	77.640.000,00		2.10.01.-Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Tahap Data Induk

Printed by SIPPD. Approved by Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan	Prioritas	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Tahun 2020	Jenis Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program / Outcome		Kegiatan / Output					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembangunan Manusia Melalui Ketenagakerjaan Pengembangan Layanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Diskominfo	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik	50 %	Jumlah jasa Retribusi yang dibayar, petugas kebersihan dan alat-alat kebersihan	1 jasa retribusi kebersihan, 2 org petugas kebersihan dan 17 item alat kebersihan	35.000.000,00	35.000.000,00		2.10.01 -Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembangunan Manusia Melalui Ketenagakerjaan Pengembangan Layanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Diskominfo	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik	50 %	Jumlah item alat tulis kantor	29 item alat tulis kantor	50.000.000,00	50.000.000,00		2.10.01 -Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pembangunan Manusia Melalui Ketenagakerjaan Pengembangan Layanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Diskominfo	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik	50 %	jumlah item barang cetakan	29 item alat tulis kantor	15.000.000,00	15.000.000,00		2.10.01 -Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Manusia Melalui Ketenagakerjaan Pengembangan Layanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Diskominfo	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik	50 %	Jumlah item Komponen Alat-Alat Listrik	3 Komponen Alat Listrik	7.500.000,00	7.500.000,00		2.10.01 -Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Tahap Data Induk

Printed by SPPD, Approved by Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintah Daerah dan	Prioritas	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan				Pagu Indikatif	Prakiraan Meja Tahun 2020	Jenis Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program / Outcome		Kegiatan / Output					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.2.10.01.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Manusia Melalui Ketenagakerjaan Pengembangan Layanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Diskominfo	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik	50 %	Jumlah Item Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komp. PC 10 Unit, AC 2 Unit, Laptop 2 Unit, Printer Smart Card 1 Unit, Printer 5 Unit, Server (2), Rak,	600.000.000,00	600.000.000,00		2.10.01. -Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembangunan Manusia Melalui Ketenagakerjaan Pengembangan Layanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Diskominfo	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik	50 %	Jumlah Surat Kabar/Majalah, Ucapan selamat, dan Buku Peringatan	Surat kabar dan Buku	20.000.000,00	20.000.000,00		2.10.01. -Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembangunan Manusia Melalui Ketenagakerjaan Pengembangan Layanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Diskominfo	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik	50 %	Jumlah Makanan dan Minuman Untuk Rapat	12 Bulan	50.000.000,00	50.000.000,00		2.10.01. -Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembangunan Manusia Melalui Ketenagakerjaan Pengembangan Layanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Diskominfo	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik	50 %	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	300.000.000,00	300.000.000,00		2.10.01. -Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Tahap Data Induk

Printed by SIPPD, Approved by Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Prioritas	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Tahun 2020	Jenis Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program / Outcome		Kegiatan / Output					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.2.10.01.01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Pembanguna n Manusia Melalui Ketenagakerja an Pengembang an Layanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Diskomin fo	Menigkatnya Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik	50 %	Jumlah Koordinasi dan Konaultasi Ke Dalam Daerah	1 Tahun	35.000.000,00	35.000.000,00		2.10.01 -Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.01.20.	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Pembanguna n Manusia Melalui Ketenagakerja an Pengembang an Layanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Diskomin fo	Menigkatnya Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik	50 %	Jumlah Tenaga Pendukung ADM Teknis Perkantoran	18 Orang	176.620.000,00	176.620.000,00		2.10.01 -Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.01.24.	Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi	Pembanguna n Manusia Melalui Ketenagakerja an Pengembang an Layanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Jumlah Spanduk, Baliho, Publikasi Media	Menigkatnya Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik	50 %	Jumlah Spanduk, Baliho, Publikasi Media	1 Tahun	200.000.000,00	200.000.000,00		2.10.01 -Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembanguna n Manusia Melalui Ketenagakerja an Pengembang an Layanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah		Meningkatnya Pelayanan Tugas Aparatur	60 %			300.000.000,00	250.000.000,00		
2.10.2.10.01.02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pembanguna n Manusia Melalui Ketenagakerja an Pengembang an Layanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Diskomin fo	Meningkatnya Pelayanan Tugas Aparatur	60 %	Terlaksanannya Pemeliharaan Gedung kantor	1 Unit	150.000.000,00	100.000.000,00		2.10.01 -Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Tahap Data Induk

Printed by SIPPD, Approved by Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Prioritas	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Tahun 2020	Jenis Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program / Outcome		Kegiatan / Output					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.2.10.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pembanguna n Manusia Melalui Ketenagakerja an Pengembang an Layanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Diskomin fo	Meningkatnya Pelayanan Tugas Aparatur	60 %	Jumlah Kendaraan Dinas Yang dapat Dioperasikan	4 Unit Kend. Dinas Rd. 4 dan 10 Unit Kend. Dinas Rd. 2	125.000.000,00	125.000.000,00		2.10.01.-Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pembanguna n Manusia Melalui Ketenagakerja an Pengembang an Layanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Diskomin fo	Meningkatnya Pelayanan Tugas Aparatur	60 %	Jumlah Peralatan kantor Yang Dipelihara	Komp. PC, Laptop Printer, AC, Mesin Genset CCTV, Serta BBM Mesin Genset dan Mesin Potong rumput	25.000.000,00	25.000.000,00		2.10.01.-Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.04.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pembanguna n Manusia Melalui Ketenagakerja an Pengembang an Layanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah		Meningkatnya Profesionalitas Dan Kinerja Aparatur	60 %			177.000.000,00	125.000.000,00		

Halaman 6 dari 11

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Prioritas	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Tahun 2020	Jenis Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program / Outcome		Kegiatan / Output					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.2.10.01.04.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembangu n Manusia Melalui Ketenagakerja an Pengembang an Layanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Diskomin fo	Meningkatnya Profesionalitas Dan Kinerja Aparatur	80 %	Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Kempemimpinan	1 Org Pimp II, 1 Org Pimp III dan 4 Org Pimp IV	152.000.000,00	100.000.000,00		2.10.01.-Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.04.03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undanga n	Pembangu n Manusia Melalui Ketenagakerja an Pengembang an Layanan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Diskomin fo	Meningkatnya Profesionalitas Dan Kinerja Aparatur	80 %	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	5 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00		2.10.01.-Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	80 %			75.000.000,00	75.000.000,00		
2.10.2.10.01.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Diskomin fo	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	80 %	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	5 Dokum en	50.000.000,00	50.000.000,00		2.10.01.-Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.06.06.	Penyusunan Evaluasi Kepuasan Konsumen terhadap Pelayanan Bidang Kominfo	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Diskomin fo	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	1 Dokum en	25.000.000,00	25.000.000,00		2.10.01.-Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Tahap Data Induk

Printed by SIPPD, Approved by Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 7 dari 11

Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintah Daerah dan	Prioritas	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Tahun 2020	Jenis Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program / Outcome		Kegiatan / Output					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.2.10.01.11.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya Dokumen Data Dasar Kab.Musi rawas	80 %			128.000.000,00	128.000.000,00		
2.10.2.10.01.11.01.	Penyusunan Profil Daerah	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Terpenuhinya Dokumen Data Dasar Kab.Musi rawas	80 %	Jumlah Dokumen PDRB, Daerah Dalam Angka, Video Profil Desa	50 Buku PDRB, 50 Buku Daerah Dalam Angka, 50 Hard Book Kab. Musi Rawas	78.000.000,00	78.000.000,00		2.10.01.-Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.11.02.	Penyusunan Data dan Statistik Sektoral Daerah	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	Terpenuhinya Dokumen Data Dasar Kab.Musi rawas	80 %	Jumlah Dokumen Statistik Daerah	50 Buku Statistik Sektoral Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00		2.10.01.-Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	40 %			5.450.000.000,00	3.050.000.000,00		

Tahap Data Induk

Printed by SIPPD, Approved by Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Prioritas	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Tahun 2020	Jenis Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program / Outcome		Kegiatan / Output					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.2.10.01.15.02.	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Muara Beliti (Kompleks Perkantoran Pemkab)	Meningkatnya Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	40 %	Tersediannya Layanan Internet bagi OPD dan Tersediannya Peralatan jaringan di Komp. Pemkab Muli Rawas	12 Bulan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00		2.10.01 -Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.15.10.	Optimalisasi Radio Darussalam	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Muara Beliti	Meningkatnya Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	40 %	Optimalnya Program Radio Darussalam	5.670 Jam Operasional 12 Bulan	250.000.000,00	250.000.000,00		2.10.01 -Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.15.14.	Pembangunan Gedung Media Center (Tahap IV)	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Muara Beliti	Meningkatnya Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	40 %	Unit	Unit	2.400.000.000,00	-	Lanjutan	2.10.01 -Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.15.18.	Pengawasan dan Pengendalian Menara telekomunikasi dan Wamnet	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Muli Rawas	Meningkatnya Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	40 %	Terfasilitasinya Tim Pengawasan dan Pengendalian Pos dan Menara Telekomunikasi	Volume Pengawasan Terhadap Menara Telekomunikasi dan Wamnet 12 Bulan	300.000.000,00	300.000.000,00		2.10.01 -Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Tahap Data Induk

Printed by SIPPD. Approved by Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintah Daerah dan	Prioritas	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Tahun 2020	Jenis Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program / Outcome		Kegiatan / Output					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.2.10.01.17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika	30 %			250.000.000,00	250.000.000,00		
2.10.2.10.01.17.01.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Muara Beliti	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika	30 %	Tersedianya SDM yang handal dalam penggunaan IT	60 PD dan Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	Baru	2.10.01 -Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.17.06.	Pengembangan Aparatur Dalam Bidang Teknologi Informasi	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Muara Beliti	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika	30 %	Tersedianya SDM yang handal dalam penggunaan IT	1 org Programer, 1 org Network Administrator, 1 org designer, 1 org photographer	100.000.000,00	100.000.000,00	Baru	2.10.01 -Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.16.	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah		Peningkatan Kerjasama Dengan Media Massa dim Rangka Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	85 %			3.725.000.000,00	3.725.000.000,00		

Tahap Data Induk

Printed by SIPPD, Approved by Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Prioritas	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Tahun 2020	Jenis Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program / Outcome		Kegiatan / Output					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.2.10.01.18.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Muara Beliti	Peningkatan Kerjasama Dengan Media Massa dim Rangka Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	65 %	Terlaksanannya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	12 Daerah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00		2.10.01 -Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.18.04	Analisis Media	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Muara Beliti	Peningkatan Kerjasama Dengan Media Massa dim Rangka Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	65 %	Terlaksanannya Kerjasama Dengan Media	12 Bln	150.000.000,00	150.000.000,00		2.10.01 -Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.18.05	Penyediaan Video HUT Kab. Musi Rawas	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Muara Beliti	Peningkatan Kerjasama Dengan Media Massa dim Rangka Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	65 %	Tersediannya Video HUT. Kab. Musi	1 Video	75.000.000,00	75.000.000,00		2.10.01 -Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.19	Program Layanan e-Government	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Pelaksanaan Layanan Bidang E-Government	45 %			2.150.000.000,00	1.350.000.000,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Prioritas	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Tahun 2020	Jenis Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program / Outcome		Kegiatan / Output					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.2.10.01.19.04	Pembangunan Aplikasi E-Government	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Muara Beliti	Meningkatnya Pelaksanaan Layanan Bidang E-Government	45 %	Terciptanya tata kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang Prima dengan pemanfaatan TIK	2 Aplikas i Pelaya nan Publik dan 4 aplikas i pemer intahan (e- Gover ment)	250.000.000,00	500.000.000,00	Baru	2.10.01.-Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.19.09	Pembinaan dan Pengelolaan Aplikasi E-Government (Aplikasi Generik Pemerintah)	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Muara Beliti	Meningkatnya Pelaksanaan Layanan Bidang E-Government	45 %	Terwujudnya Implementasi aplikasi generik Pemerintah	SIMAYA LAPOR SP4N dan E-PPID	200.000.000,00	200.000.000,00	Baru	2.10.01.-Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.19.10	Pengelolaan Layanan Portal Website Kabupaten Musi Rawas	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Muara Beliti (Komplek s Perkantoran Pembkab)	Meningkatnya Pelaksanaan Layanan Bidang E-Government	45 %			250.000.000,00	250.000.000,00		2.10.01.-Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.19.11	Pembuatan Master Plan Pelaksanaan E-Government (MURA Smart City)	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggar aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Diskomin fo	Meningkatnya Pelaksanaan Layanan Bidang E-Government	45 %	Tersediannya Dokumen Perencanaan Dalam Mewujudkan Mura Smart City	1 Dokum en Master Plan Mura Smart City	300.000.000,00		Baru	2.10.01.-Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Tahap Data Induk

Printed by SIPPD, Approved by Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Lampiran 12 dari 1												
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Prioritas	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Tahun 2020	Jenis Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program / Outcome		Kegiatan / Output					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.2.10.01.19.12.	Optimalisasi dan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE)	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Muara Betiti (Komplek s Perkantoran Pembkab)	Meningkatnya Pelaksanaan Layanan Bidang E-Government	45 %	terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara elektronik	12 Bulan Operasi asional LPSE dan Jasa Collocation Server	500.000.000,00	250.000.000,00		2.10.01.-Dinas Komunikasi, dan Statistik
2.10.2.10.01.19.13.	Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Berbasis Elektronik (e-voting)	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Muara Betiti (Komplek s Perkantoran Pembkab)	Meningkatnya Pelaksanaan Layanan Bidang E-Government	45 %	Terlaksananya Proses Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik (E-Voting)	Kecamatan dan 28 Desa Yang akan melaksanakan plikades	200.000.000,00		Lanjutan	2.10.01.-Dinas Komunikasi, dan Statistik
2.10.2.10.01.19.14.	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik e-Government	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Diskominfo	Meningkatnya Pelaksanaan Layanan Bidang E-Government	45 %	Terlaksananya Sistem pemerintahan Berbasis elektronik	Penilaian SPBE 1 Tahun	150.000.000,00	150.000.000,00	Baru	2.10.01.-Dinas Komunikasi, dan Statistik
2.10.2.10.01.19.15.	Pengadaan dan Penyediaan Peralatan Pemilihan Secara Elektronik (e-voting)	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggara an Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Diskominfo	Meningkatnya Pelaksanaan Layanan Bidang E-Government	45 %	Terlaksananya Proses Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik	30 Set Peralatan e-voting	300.000.000,00		Baru	2.10.01.-Dinas Komunikasi, dan Statistik

Tahap Data Induk

Printed by SPPD, Approved by Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 13 dari 15

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Prioritas	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Tahun 2020	Jenis Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program / Outcome		Kegiatan / Output					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.2.10.01.20.	Program Pengelolaan Komunikasi Publik	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggara aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Pengelolaan Komunikasi Publik dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah	80 %			150.000.000,00	200.000.000,00		
2.10.2.10.01.20.20.	Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kab. Musi Rawas	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggara aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Diskomin fo	Meningkatnya Pengelolaan Komunikasi Publik dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah	80 %	Tertaksanannya Pembinaan & Pengembangan KIM	1 Tahun	150.000.000,00	200.000.000,00	Lanjutan	2.10.01.-Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.21.	Program Keamanan Informasi dan Persandian	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggara aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah		Meningkatnya keamanan Informasi dan Persandian	80 %			840.000.000,00	440.000.000,00		
2.10.2.10.01.21.08.	Operasional Pengamanan Data dan Informasi	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggara aan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Diskomin fo	Meningkatnya keamanan Informasi dan Persandian	80 %	Meningkatnya Pengamanan Data Dan Informasi	12 Bulan Opera sional Pengsa manan Data Dan Inform asi	100.000.000,00	100.000.000,00		2.10.01.-Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Prioritas	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Tahun 2020	Jenis Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program / Outcome		Kegiatan / Output					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.2.10.01.21.10.	Operasional Pelaksanaan Sandi dan Telekomunikasi	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Diskomin fo	Meningkatnya keamanan Informasi dan Persandian	60 %	Meningkatnya Pelaksanaan Operasional Sandi dan Telekomunikasi	12 Bulan Operasional Sandi dan Telekomunikasi	90.000.000,00	90.000.000,00		2.10.01.-Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.21.11.	Implementasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Diskomin fo	Meningkatnya keamanan Informasi dan Persandian	60 %	Terlaksananya Implementasi PPID	12 Bulan	250.000.000,00	250.000.000,00	Baru	2.10.01.-Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
2.10.2.10.01.21.13.	Pengadaan Peralatan Sandi dan Telekomunikasi	Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintah Daerah	Diskomin fo	Meningkatnya keamanan Informasi dan Persandian	60 %	Terpenuhinya Peralatan Sandi dan Telekomunikasi dalam rangka pengamanan data dan Informasi	7 Unit (Jamm er, Flashdisk Sandi, Laptop Sandi, penghubung kartu, Mesin Scan Trans msi Sandi, Brankas Sandi	400.000.000,00		Baru	2.10.01.-Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Lampiran 15 dari 1												
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Prioritas	Sasaran	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju Tahun 2020	Jenis Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Program / Outcome		Kegiatan / Output					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JUMLAH									14.975.760.000,00	11.323.760.000,00		

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Urusan : Kominfo, Statistik dan Persandian
OPD : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas

Handwritten signature and initials
H. Fikri

Kode Kegiatan	Prioritas Program dan Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1	2	3	4	5
2.	Belanja Langsung			
2.10	Komunikasi dan Informatika			8.756.125.000
2.10.2.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase cakupan layanan administrasi perkantoran		1.515.170.000
2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air dan telephone yang terbayar	4 Rek Listrik, 2 Rek Air dan Jasa TV Berlangganan	97.800.000
2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas yang dibayar	4 Unit Kend Dinas Rd. 4 dan 10 Unit Kend. Dinas Rd. 2	15.000.000
2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa retribusi yang dibayar, petugas kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	2 Js Ret Kebersihan, 21 Item Alat Kebersihan dan 2 Ong Jasa Petugas Kebersihan Kantor	34.000.000
2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	46 Item Alat Tulis Kantor	55.000.000
2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan penggandaan	3 Item Barang Cetak dan Fotocopy	15.000.000
2.10.2.10.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item komponen alat-alat listrik	12 Item komponen alat listrik, penambahan daya listrik dan pemasangan listrik baru	60.620.000
2.10.2.10.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Kantor Diskominfo dan Gedung Media Center)	AC 6 Unit, Laptop 4 Unit, Printer 6 Unit, Alat Penyempnot Rumput, Meja Pimpinan, Kursi Pimpinan, Kursi Stainles, Meja 1/2 Biro, Lemari Es, Filing Cabinet, Server 2 Unit, Rak Server 1 Unit, UPS 2 Unit, Tablet 1 Unit, Pocket Projector 1 Unit, Mesin Penghancur kertas 1 Unit, Mesin absen sidik jari 1 Unit, Camera 2 Unit, Drone outdoor 1 Unit, Mixer 1 Unit dan CCTV	600.000.000
2.10.2.10.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Media Lokal dan Regional	25.000.000
2.10.2.10.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	300.000.000
2.10.2.10.01.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 Tahun	35.000.000
2.10.2.10.01.01.20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Jumlah tenaga teknis perkantoran	19 orang (TKS dan Petugas Jaga Malam)	207.750.000

2.10.2.10.01.01.24	Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi	Jumlah spanduk dan balok	1 Tahun	70.000.000
2.10.2.10.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur		238.530.000
2.10.2.10.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	6 Paket Pekerjaan Pemeliharaan	123.500.000
2.10.2.10.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit kend Dinas Rd.4 dan 10 Unit Kend. Dinas Roda 2	95.030.000
2.10.2.10.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Komp. PC, Laptop, Printer	20.000.000
2.10.2.10.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase ketersediaan sumber daya aparatur yang handal		162.250.000
2.10.2.10.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	1 Org Pimp II, 1 Org Pimp III dan 2 Org Pimp IV	112.250.000
2.10.2.10.01.05.03	Bimbingan Teknis/Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	10 Org	50.000.000
2.10.2.10.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase ketercapaian sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang baik		9.005.000
2.10.2.10.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD Kab. Musi Rawas	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan	RI/NJA, RKA, DPA, LPPD, LKJP, Profil, RTP SPIP dan Laporan Keuangan	9.005.000
2.10.2.10.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data dan informasi statistik daerah		65.820.000
2.14.2.10.01.15.07	Penyusunan Profil Daerah	Jumlah dokumen Daerah Dalam Angka, PIDRB dan Handbook Kab. Musi Rawas	45 Buku DDA, 45 Buku PIDRB dan 45 Hand Book Kab. Musi Rawas	39.205.000
2.14.2.10.01.15.08	Penyusunan Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen statistik sektoral daerah Kab. Musi Rawas	45 Buku Statistik Sektoral Daerah	26.615.000
2.10.2.10.01.15	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Meningkatnya pengembangan komunikasi informasi dan media massa		4.104.750.000
2.10.2.10.01.15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah jasa sambungan internet	12 Bln Jasa Sambungan Internet di 35 OPD, Radio Darussalam, Public Area dan Kantor Imigrasi	1.529.750.000
2.10.2.10.01.15.10	Optimalisasi Radio Darussalam	Optimalnya program Radio Darussalam	5.670 Jam Siaran Radio Darussalam	245.000.000
2.10.2.10.01.15.11	Pembangunan Gedung Media Center (Tahap IV)	Jumlah Gedung Media Center	1 Unit	2.100.000.000
2.10.2.10.01.15.18	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Jumlah menara telekomunikasi yang dilakukan pengawasan	123 Menara Telekomunikasi	230.000.000
2.10.2.10.01.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa			1.390.000.000

2.10.2.10.01.18.01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan daerah	155 Media	1.350.000.000
2.10.2.10.01.18.05	Penyediaan Video HUT Kab.Musi Rawas	Tersedianya video HUT Kab. Musi Rawas	1 Video	40.000.000
2.10.2.10.01.19	Program Layanan e-Government	Meningkatnya pelaksanaan e-Government		1.143.600.000
2.10.2.10.01.19.04	Pembangunan Aplikasi e-Government	Terlaksananya pengembangan e-Government	4 Aplikasi (e-SAKIP, e-Data, Aplikasi Pileg, Aplikasi berbasis Mobile Android)	510.700.000
2.10.2.10.01.19.10	Pengelolaan Layanan Portal Website Kabupaten Musi Rawas	Terlaksananya pengelolaan aplikasi e-government bagi seluruh perangkat daerah	1 Portal Web Musi Rawas dan 5 Website OPD	122.500.000
2.10.2.10.01.19.11	Pembuatan Master Plan Pelaksanaan e-Government	Jumlah Dokumen master plan	1 Dokumen Master Plan	222.000.000
2.10.2.10.01.19.12	Optimalisasi dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik	12 Bln Operasional LPSE, Jasa Collocation Server dan 60 Org Peserta Pelatihan	228.400.000
2.10.2.10.01.19.14	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik e-Government	Terlaksananya proses penilaian sistem pemerintahan berbasis elektronik	Penilaian SPBE	60.000.000
2.10.2.10.01.20	Program Pengelolaan Komunikasi Publik	Meningkatnya peran dan fungsi persandian daerah		69.000.000
2.10.2.10.01.20.20	Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kab. Musi Rawas	Terlaksananya pembentukan KIM Kabupaten	KIM Kabupaten	69.000.000
2.10.2.10.01.21	Program Keamanan Informasi dan Persandian	Meningkatnya peran dan fungsi persandian daerah		58.000.000
2.10.2.10.01.21.11	Implementasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Terlaksananya Implementasi PPID	120 Org Peserta Sosialisasi	58.000.000
Jumlah				8.756.125.000

Muara Beliti, 26 November 2018



Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN MUSI RAWAS

MUHAMMAD ROZAK, SE
Pembina
NIP. 19720606 200501 1 008



BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 777/KPTS/DISKOMINFO/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Kerja merupakan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Musi Rawas.
- b. Ketua : Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Musi Rawas.
- c. Wakil Ketua : Kabid Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Musi Rawas.
- d. Sekretaris : Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Musi Rawas.
- e. Anggota :
 - 1. Kabid Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Musi Rawas;
 - 2. Kabid Layanan e-Government Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Musi Rawas;
 - 3. Kasi Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Musi Rawas;
 - 4. Kasi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Musi Rawas;
 - 5. Kasi Tata Kelola e-Government Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Musi Rawas;
 - 6. Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Musi Rawas.
- d. Operator :
 - 1. Awaludin Septian, A.Md;
 - 2. Rahmat Ramadhoni, S.Kom.

- e. Narasumber : 1. Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel;
2. Bappeda Kabupaten Musi Rawas.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
a. mengumpulkan bahan yang akan digunakan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019;
b. menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019;
c. menyampaikan hasil penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 kepada Bupati Musi Rawas melalui Kepala BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 melalui anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 28 DESEMBER 2018
BUPATI MUSI RAWAS,



H. HENDRA GUNAWAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BAPPEDA Kab. Musi Rawas;
2. Kepala BPKAD Kab. Musi Rawas;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Musi Rawas.